K O L O M S i K L E R K

PEMANGKASAN JABATAN STRUKTURAL DAN KEKHAWATIRAN TERHADAP OTDA

Kekhawatiran terhadap pemberlakuan otonomi daerah ini bukan saja menjadi kekhawatiran para pejabat struktural tetapi juga para pengusaha. Mereka sangat khawatir dengan berkurangnya minat investor menanamkan modalnya di daerah. Bagi para pejabat struktural seperti yang diberitakan Harian Pikiran Rakyat dari 2053 pejabat struktural Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat akan ditiutkan menjadi hanya 772, dan jumlah pegawai yang 15.000 akan berkurang menjadi 4000-5000 pegawai saja serta akan menghapuskan pegawai kontrak yang berjumlah 2100 orang.

Langkah rasionalisasi ini memang perlu dilakukan sesuai dengan konsekuensi pemberlakuan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom serta PP No. 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu penciptaan beberapa dinas/badan/lembaga juga yang mengharuskan terjadinya pengurangan jumlah pegawai tersebut.

Likuidasi beberapa Bank telah cukup menimbulkan gejolak di masyarakat. Ribuan karyawan menganggur. Kemudian disusul dengan likuidasi beberapa departemen yang juga menimbulkan keresahan baru. Bahwa mereka masih berstatus pegawai memang betul, tetapi mereka tidak lagi nyaman dalam bekerja. Dalam arti mereka hanya menerima gaji dan tidak jelas apa yang harus mereka kerjakan. Sementara itu pengalihan ke tempat kerja instansi lain juga tidak serta diterima dengan begitu saja.

Sementara itu kekhawatiran yang sama juga dirasakan oleh dunia usaha. Dedi Dharmawan dalam (PR 21 Nopember 2000) bahwa Musyawarah Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) di Bandung yang mempersoalkan otonomi daerah yang ditetapkan oleh UU No.22 tahun 1999 mulai berlaku tahun 2001. Ada kekhawatiran para pengusaha Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) pelaksanaan otonomi Daerah akan menambah pungutan daerah yang tertuju pada mereka. Beberapa gejala menunjukkan adanya tekanan daerah tertentu yang seolah hanya menghendaki tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masih menurut Musyawarah ini bahwa apabila otonomi ini ternyata menambah sekat-sekat birokrasi, maka otda dipandang kontradiktif dengan tuntutan pasar global yang akan diberlakukan pada tahun 2003.

Pada tempatmyakah kekhawatiran dunia usaha, otda akan menambah beban dan ruwetnya dunia mereka?

Sementara itu bakal henggangnya para pejabat struktural serta ribuan pegawai dari tempatnya sekarang, akankah menimbulkan gejolak baru?